



dpmptsp
LUWU TIMUR
melayani anda, membangun bersama

RENJA TAHUN 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR
2024**

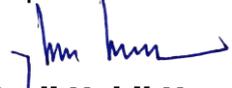
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja SKPD merupakan *Dokumen* Perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur selama satu tahun anggaran. Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan. Perubahan permendagri atau pengganti Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Renja DPMPTSP Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Malili, Juni 2024
Kepala Dinas



Andi Habil Unru, SE

Pangkat : Pembina Utama muda
Nip : 19641231 198703 1 208

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA DPM-PTSP TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPM-PTSP
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPM-PTSP
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V : PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun dokumen Rencana Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja OPD

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi:
-

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal : Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :
- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan : penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Perangkat Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/Lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas : Perangkat Daerah forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir : Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
-

dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjabarkan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Renja dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
 2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.
-

Rancangan Awal Renja kemudin disempurnakan menjadi Rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bapelitbangda Kab. Luwu Timur untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia)Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
-

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
-

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
-

- Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 112 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B.HK.11.111.21)
 18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
 19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
 20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2025;
 2. Merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk
-

memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan daerah;

3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2025 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang rencana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Mempermudah Pengendalian, monitoring evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2053.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 adalah :

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas;
 2. Mengoptimalkan peran dan fungsi DPMPTSP di dalam penanganan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
 3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Luwu Timur.
 4. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan DPMPTSP.
 5. Meningkatnya pembinaan dan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
-

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-PTSP) di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Penjelasan mengenai Program dan Kegiatan serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penjelasan mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah serai Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tahun 2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD DPM-PTSP. Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 32 subkegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.442.538.832,- atau sebesar 93,40% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.756.588.125,-. Belanja Daerah terbagi menjadi Belanja Operasi sebesar Rp 4.623.588.125,- dan Belanja Modal sebesar Rp 133.000.000,-. Realisasi belanja operasi terbagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp. 2.358.233.969,- atau sebesar 95,81 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.461.491.163,- dan realisasi belanja barang dan jasa Rp. 1.952.678.317,- atau sebesar 90,31 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.162.096.962,- sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 133.000.000,- terealisasi Rp 131.626.546,- atau sebesar 98,97%.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023 dalam memenuhi tercapainya sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi Daerah meliputi:

LAMPIRAN 1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (Tahun n-2)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2023 (n-2)			Target Program/ Kegiatan Tahun 2024 (Renja SKPD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d n tahun berjalan 2024		SKPD Pelaksana
					Target Renja SKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2023 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024 (Tahun berjalan/ n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penunjang urusan perangkat Daerah berjalan sesuai Standar		100	95	98	1.03		98,78		DPMTSP
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		80	17	17	1.00		17		

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		10	2	2	1.00		2		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD		10	2	2	1.00		2		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD		10	2	2	1.00		2		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah		50	10	10	1.00		10		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		12	100	86	0,86		97		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN		900	21	19	0.85		19		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		60	18	18	1.00		18		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang di tatusahkan		2	100	100	1.00		100		

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	4	4	1.00		4		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah		4	100	100	1.00		100		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	-	-	-		-		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		80	12	12	1.00		12		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4	13	10	1.00		16		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah		1	100	100	1.00		98		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		4	12	12	0.75		15		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		100	2	2	1.00		2		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		17	3	3	1.00		3		

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		100	60	60	1.00		60		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya		1	150	150	1.00		120		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan		100	271	283	1.00		424		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		6	16	16	1.00		1		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan									
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan		13	12	12	1.00		-		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pembangunan taman, lapangan dan fasilitas Parkir yang diadakan		5	1	1	1.00		-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		4	4	4	1.00		1		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12	100	100	1.00		100		

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan	2	1200	1344	1.12		804		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, SDA dan listrik yang terbayarkan	1	60	60	1.00		60		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum	2	4	4	1.00		4		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	14	57		1.11		53		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2922	9	9	1.00		9		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	47	49	1.04		43		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	17	1	1	1.00		1		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN yang berskala Nasional	50	30	46	1.53		35		
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMA/PMDN yang terfasilitasi	95	90	90	1.00		100		

	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah PERDA Penanaman Modal yang dibuat	10	1	1	1.00		2		
	Evaluasi pelaksanaan fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal	jumlah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan		2	2	1.00		2		
	Pembuatan Peta Potensi Investasi kab/Kota	Persentase Jenis Potensi yang disusun dalam Peta Potensi Kabupaten						100		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten/Kota						1		
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi PMA Jumlah Realiasi PMDN		35	35	1.00				
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan						5		
	Penyusunan Strategi promosi penanaman modal	jumlah media promosi penanaman modal		2	2	1.00		3		
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah/kabupaten/kota	jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakn		1	1	1.00		2		

	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP							82,24		
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin yang diterbitkan			100				100		
	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui Perizinan Berusaha Berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang dilayani secara elektronik			4100	4748	1.15		5474		
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti			5	5	1.00		6		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku Usaha yang Taat terhadap peraturan yang terkait Penanaman Modal							80		
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM							95		
	Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	kegiatan pemantauan kepada pelaku usaha PMDN dan UKM			9	9	1.00		8		

	Bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha	jumlah bimtek/sosialisasi kemudahan berusaha kepada PMA/PMDN Dan UKM			8	8	1.00		240		
	Pengawasan Penanaman Modal	kegiatan pengawasan kepada pelaku usaha PMDN dan UKM			13	13	1.00		14		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	presentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola			100	100	1.00		1		
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data dan informasi Perizinan dan nonperizinan			100	100	1.00		100		
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah data yang disediakan	90		2	2	1.00		2		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun 2023 dapat diamati dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Sasaran Strategis 1 ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembukaan peluang lapangan kerja oleh pengusaha dan swasta.

Dengan Rumus :

$$\frac{(\text{Jumlah Investasi } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1)}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n-1} \times 100 \%$$

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 DPMPSTSP Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)	Ket
Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif di Daerah	a. Total Nilai Investasi	Juta Rupiah	3.500.000	4.024.437	114,98	●
	1. Nilai Investasi Modal Asing (PMA)	Juta Rupiah	2.650.000	2.974.791	112,25	●
	2. Nilai Investasi Modal Dalam Negeri (PMDN)	Juta Rupiah	850.000	1.049.645	123,48	●

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Keterangan : ● Mencapai/Melampui Target ; ● Belum Mencapai Target

Adapun Target Realisasi Investasi Tahun Tahun 2022 dan Tahun 2023 terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 12.

Perbandingan Capaian Investasi Berskala Nasional PMA dan PMDN Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 – 2023

No	Jenis Investasi	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	PMA	2.500.000.000.000	2.947.236.398.569	117,88	2.650.000.000.000	2.974.791.374.751	112,25
2	PMDN	800.000.000.000	1.144.862.849.673	143,00	850.000.000.000	1.049.645.884.399	123,48
	TOTAL	3.300.000.000.000	4.092.099.248.242	124,00	3.500.000.000.000	4.024.437.259.150	114,98

Perkembangan realisasi Investasi berdasarkan LKPM dan izin usaha ini sangat bergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha (PMA dan PMDN) dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap tahunnya. Jika kepatuhan para pengusaha dalam menyampaikan LKPM tersebut semakin baik, maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pada tahun – tahun berikutnya akan semakin meningkat dan pemerintah daerah dapat memantau perkembangan investasi dengan baik. Akan tetapi, jika hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha maka tidak menutup kemungkinan nilai realisasi investasi pun akan cenderung menurun bahkan semakin berkurang.

Oleh karena itu, sinergitas antara pengusaha dengan pemerintah daerah harus terus di tingkatkan agar setiap kegiatan investasi di daerah dapat dikendalikan dan terpantau dengan baik sehingga diharapkan iklim investasi di Kabupaten Luwu Timur cenderung lebih kondusif pada tahun-tahun berikutnya.

Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, dengan upaya secara terus menerus meningkatkan pelayanan perizinan.

**Perbandingan Capaian Jumlah Investasi PMA
Kab. Luwu Timur Tahun 2016 - 2023**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2016	0	-	0	Rp. 268.605.000.000
2017	21	-	21	Rp. 120.117.000.000
2018	34	-	34	Rp. 603.035.000.000
2019	13	-	13	Rp. 549.259.000.000
2020	8		8	Rp. 2.185.879.000.000
2021	8	8.003.575.455.108	8	Rp.3.604.254.631.433
2022	9	183.367.444.000	10	Rp.2.947.236.398.569
2023	20	31.794.525.771.500	12	Rp.2.974.791.374.751

**Perbandingan Capaian Jumlah Investasi PMDN
Kab. Luwu Timur Tahun 2017 - 2023**

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)
2017	30	416.715.000	30	452.245.000.000
2018	34	646.710.000.000	34	516.916.000.000
2019	32	6.120.947.250.000	32	598.558.569.406
2020	21	1.838.630.911.080	21	1.636.201.132.539
2021	41	1.932.338.626.816	422	567.486.903.997
2022	1749	5.072.166.453.138	131	1.114.862.849.673
2023	9262	3.488.504.120.743	72	1.049.645.884.399

Perbandingan Target dan Realisasi Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Nilai realisa investasi Daerah						Target Tahun 2021
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023			Tahun 2022			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai Realisasi Investasi	3,5 Triliun	4,024 T	114,98 %	3,3 Triliun	4,092 T	124 %	3 Triliun

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dari urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023, meliputi :

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk mengetahui Jumlah Investor yang berskala Nasional pada Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan nilai realisasi investasi penanaman modal. Pada tahun 2023 Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :

- **Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahah penanaman modal**

Penyusunan PERDA Penanaman Modal, dalam rangka menjadi regulasi kegiatan penanaman modal. Penyusunan PERDA sangat diperlukan karena dalam pelaksanaan pengambilan kebijakan penanaman modal . Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah dokumen Perda , target kinerja 2 Dokumen Perda dan terealisasi sebanyak 1 dokumen Perda Penanaman Modal dan 1 Dokumen Perda Kemudahan Perizinan berusaha dan Nonperizinan dengan capaian sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 119.560.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 117.533.574,- atau sebesar 98,31%.

- **Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Merupakan kegiatan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan kendala dalam rangka pencapaian target rencana investasi

penanaman modal. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dalam rangka memetakan kendala-kendala yang dihadapi oleh investor dalam rangka mencapai target investasi yang telah direncanakan. Target *output* subkegiatan adalah Jumlah Jumlah kegiatan Evaluasi yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi 100%. Anggaran sebesar Rp. 42.134.290,- dan Realisasi Sebesar Rp. 39.607.050,- atau sebesar 95,00%.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai realisasi investasi penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada tahun 2023 Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu :

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :

- **Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal**

Penyusunan Strategi promosi penanaman modal, merupakan kegiatan yang bersifat promosi dan penyampaian informasi tentang investasi dan kondisi perkembangan investasi di Kabupaten Luwu Timur. Penyebaran informasi ini menggunakan media koran dalam hal ini koran ujung pandang expres (UPex). Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah media promosi penanaman modal, target kinerja 3 media dan terealisasi sebanyak 2 media dengan capaian sebesar 70%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 22.638.490,- terealisasi sebesar Rp. 15.785.000,- atau sebesar 69,37%.

- **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

Penyelenggaraan promosi Investasi daerah, merupakan kegiatan pelaksanaan pameran daerah yang dilaksanakan di Kabupaten, Luar Kabupaten dan Luar Provinsi dengan tujuan sebagai ajang promosi daerah melalui penyebaran informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki dan membuka peluang usaha kerjasama serta kemitraan dengan peserta dan pelaku bisnis serta sebagai tolak ukur kekuatan daya saing produk-produk keunggulan daerah yang dipamerkan. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti/dilaksanakan, target kinerja 3 pameran dan terealisasi pada Pameran APKASI yang dilaksanakan di Jakarta, Dekranasda di Bone, Sul-Sel Expose. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.158.360.000,- terealisasi sebesar Rp 71.266.940,- atau sebesar 45,00%.

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini merupakan Kegiatan DAK non fisik yang baru pertama kali pada Tahun 2021 di laksanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk melaporkan dan mendampingi kegiatan Pananaman modal pada Perusahaan PMA/PMDN, dan UKM. Dimana target kinerjanya sebanyak 30 LKPM. Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu:

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Pengawasan penanaman modal merupakan pengawasan terhadap pengumpulan, verifikasi dan evaluasi LKPM yang meliputi: keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan yang dimiliki, realisasi investasi dan permodalan. Kegiatan pengawasan penanaman modal ini dilakukan

bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Luwu Timur. Dalam pelaksanaannya Investor/perusahaan yang telah memiliki Ijin Prinsip (IP) diharapkan segera melaporkan LKPM secara online baik itu masa konstruksi/pembangunan yang dilaporkan setiap 3bulan sekali maupun 6 bulan sekali. Target Output kegiatan adalah Jumlah laporan pengawasan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan yang disusun. Anggaran untuk kegiatan Pengawasan sebesar Rp 103.394.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 98.442.345,- atau sebesar 95,21%. yang terdiri dari Belanja ATK, belanja penggandaan, jilid dan perjalanan dinas. Target kinerja pada kegiatan ini sebanyak 13 kegiatan dan terealisasi sebesar 100%.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, adalah kegiatan Bimtek kepada penanaman modal/investor/perusahaan untuk merealisasikan laporan penanaman modalnya. Dengan pelaporan LKPM secara berkala, pemerintah dapat memantau dan mengawasi perkembangan Penanaman Modal sehingga apabila ada kendala dapat dilakukan pembinaan. Kegiatan Anggaran untuk kegiatan Pembinaan sebesar Rp 366.105.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 302.148.946,- atau sebesar 82,53%. Target kinerja pada kegiatan ini berupa kegiatan Bimtek sebanyak 9 kali dan terealisasi sebanyak 9 kali atau 100%.

Sasaran Strategis II

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Rata-rata lama penyelesaian Perizinan dihitung dengan cara membagi antara jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan izin yang masuk dikalikan dengan 100%.

$$\text{Rata-rata penyelesaian Perizinan} = \frac{\sum \text{izin yang terbit tepat waktu}}{\sum \text{seluruh Berkas yang masuk}} \times 100\%$$

Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 DPMPTSP Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	a. Rata-rata lama penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan	%	75,00	94,29	125,72

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Standar Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Intervar Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25 – 64.99	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.26 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Kuesioner perhitungan IKM pelayanan menggunakan 9 unsur pelayanan. Jumlah SKM sampai dengan bulan Januari s.d Desember 2023 **sebanyak 357 lembar kuesioner**. Dengan menggunakan perhitungan rumus dan cara yang ditetapkan sesuai pedoman umum penyusunan SKM Nomor 16 tahun 2014,

jumlah kategori tingkat pelayanan yang disesuaikan Survey Kepuasan Masyarakat 87,84 (Baik).

Nilai Unsur-Unsur Pelayanan

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,529
U2	Prosedur Pelayanan	3,451
U3	Ketepatan Waktu Pelayanan	3,367
U4	Biaya/tarif	3,975
U5	Produk Layanan	3,291
U6	Kompetensi pelaksana	3,457
U7	Perilaku Pelaksana	3,448
U8	Sarana dan Prasarana	3,482
U9	Penanganan Pengaduan	3,622
NRR Unsur		= 31,622

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas, maka dapat dihitung Nilai IKM Tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{NRR Tertimbang} &= \text{NRR Unsur} \times 1/9 \\
 &= 31,622 \times 1/9 \\
 &= 3.1535
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{IKM} &= \text{Total NRR Tertimbang} \times 25 \\
 &= 3,510 \times 25 \\
 &= \mathbf{87,84}
 \end{aligned}$$

Sasaran Strategis 2 ini Merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi dalam rangka menciptakan Pemerintahan dan Pelayan Publik yang lebih baik. Program dan Kegiatan yang mendukung antara lain:

1. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini bertujuan untuk pelayanan perizinan dengan indicator jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada tahun 2023 Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan yaitu:

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 2 sub kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, merupakan penyediaan dan penerbitan izin. Penerbitan izin ini menggunakan aplikasi OSS dan SICANTIK. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan 33 jenis izin. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah izin yang diterbitkan, target kinerja 6.000 izin dan terealisasi sebanyak 1.126 Izin dengan capaian sebesar 115,80%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.338.490.930,- terealisasi sebesar Rp. 333.932.400,- atau sebesar 98,65%.

Adapun jenis-jenis izin antara lain :

- Izin Lingkungan Hidup
- Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Izin Lokasi
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman dan perumahan
- Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
- Sertifikat layak fungsi bangunan
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Tanda daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- Izin Usaha Industri (IUI)
- Tanda daftar Industri (TDI)
- Tanda Daftar Gudang (TDG)
- Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
- Izin Rumah Potong Hewan
- Izin Usaha Peternakan
- Surat Izin Usaha lembaga Penempatan tenaga kerja Swasta (LPTKS)
- Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- Perpanjangan IMTA

- Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT)
- Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Izin Tenaga Kesehatan
- Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
- Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat
- Izin Trayek
- Izin Usaha Transportasi
- Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam
- Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha toko Swalayan
- Surat Tanda pendaftaran waralaba (STPW)
- Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan
- Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten
- Izin Reklame
- Izin Penelitian

Tetapi tidak semua izin diterbitkan, hanya sesuai dengan permintaan dan pemenuhan syarat administrasi dan kebijakan yang ada. Penerbitan izin melibatkan 12 Instansi teknis terkait yang sesuai dengan penerbitan Izin antara lain : Dinas transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan. Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dalam pelaksanaannya pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan

prosedur dan SOP yang ada, apabila pengaduan itu bukan ranah tingkat Kabupaten maka akan difasilitasi dan dilanjutkan ke Provinsi. Anggaran untuk kegiatan Pengaduan sebesar Rp 20.323.933,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 20.301.133,- atau sebesar 99,89%. Target kinerja pada kegiatan ini berupa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan Kegiatan ini bersifat persediaan.

4. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah dokumen Perizinan yang disusun sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 100%. Anggaran sebesar Rp. 32.649.600,- dan Realisasi Sebesar Rp. 32.168.000,- atau sebesar 98,52%. Dokumen ini meliputi laporan jenis-jenis perizinan, jumlah izin, dan prosedur perizinan yang dilakukan perbulan, pertriwulan dan tahunan. Dokumen ini diserahkan dan dilaporkan kesemua instansi terkait/instansi teknis, provinsi dan pusat

5. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan aparatur pada DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur guna peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2021 Program ini dilaksanakan dengan 9 kegiatan dan 26 sub kegiatan yaitu :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 3 dokumen dan terealisasi

100%. Anggaran sebesar Rp. 30.673.541,- dan Realisasi Sebesar Rp. 30.405.703,- atau sebesar 99,13%.

- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 100%. Anggaran sebesar Rp. 10.773.641,- dan Realisasi Sebesar Rp. 10.630.000,- atau sebesar 98,67%.

- Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 100%. Anggaran sebesar Rp. 6.373.484,- dan Realisasi Sebesar Rp. 6.363.300,- atau sebesar 99,84%.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu sebanyak 10 dokumen dan terealisasi 100%. Anggaran sebesar Rp. 36.678.215,- dan Realisasi Sebesar Rp. 36.060.000,- atau sebesar 98,31%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan sebanyak 21 orang dan terealisasi 18 orang atau sebesar 85,71%. Anggaran sebesar Rp. 2.262.279.288,- dan Realisasi Sebesar Rp. 2.016.297.278,- atau sebesar 89,13%.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah yang disusun tepat waktu sebanyak 18 Dokumen dan terealisasi 18 dokumen atau sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 106.007.536,- dan Realisasi Sebesar Rp. 100.005.000,- atau sebesar 94,34%.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 15.614.327,- dan Realisasi Sebesar Rp. 14.431.000,- atau sebesar 92,42%.

d. Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah, terdiri dari 1 sub kegiatan :

- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah Laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 4 dokumen atau sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp. 11.645.560,- dan Realisasi Sebesar Rp. 11.645.000,- atau sebesar 100%.

e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapan yang diadakan sebanyak 43 stel dan terealisasi 40 stel atau sebesar 93,02% hal ini disebabkan karena masih ada 3 jabatan yang kosong (sekretaris dinas dan 2 kepala seksi). Anggaran sebesar Rp. 30.600.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 27.300.000,- atau sebesar 89,22%.

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Target *output* subkegiatan adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda sebanyak 900 surat terealisasi sebanyak 1.332 surat capaian 148%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 95,29% dari Target Anggaran Sebesar Rp.. 2.760.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 2.630.000,-.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak 10 orang terealisasi sebanyak 10 orang atau 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 95,29% dari target Anggaran Sebesar Rp 57.870.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 54.610.000,- atau sebesar 94,37%.

f. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 sub kegiatan:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Subkegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor. Target *output* kegiatan Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 12 jenis dan terealisasi 12 Jenis atau 100%. Anggaran sebesar Rp. 5.857.300,-, terealisasi Sebesar Rp. 5.791.500,- atau sebesar 98,88%. Adapun komponen alat listrik

tersebut terdiri dari kabel, piiting, steker dan balon lampu. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Subkegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan bahan logistik kantor. Target *output* kegiatan Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 jenis dan terealisasi 2 Jenis atau 100%. Anggaran sebesar Rp. 14.398.300,-, terealisasi Sebesar Rp. 14.049.100,- atau sebesar 57,57%. Adapun bahan logistic kantor yang disediakan berupa bahan-bahan bakar dan pelumas serta belanja bahan lainnya. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target *output* Subkegiatan adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan yaitu sebanyak 3 jenis dan terealisasi 3 jenis. Anggaran Sebesar Rp. 13.675.000,- dan terealisasi Sebesar Rp. 13.617.000,- atau 99,58%.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Subkegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan minat baca serta meningkatkan pengetahuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Target *output* kegiatan adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 60 eksemplar (surat kabar lokal, surat kabar regional dan surat kabar nasional) dan terealisasi 60 eksemplar atau 100 %. Anggaran Sebesar Rp. 6.120.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 6.120.000,- atau 100%.

- **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Target *output* subkegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya sebanyak 150 orang dan terealisasi 150 orang atau 100%. Anggaran Sebesar Rp. 8.100.000,- dan realisasi Sebesar Rp. 7.740.000,- atau 95,56%.

- **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Subkegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP serta sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, propinsi dan kabupaten sebagai upaya peningkatan Pengembangan program dan kegiatan yang ada pada DPMPTSP. Dari target *output* kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan sebanyak 271 kali terealisasi 283 kali capaian 104,43%. Anggaran Sebesar Rp. 380.326.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 380.250.500,- atau 99,98%.

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:

Program ini diarahkan agar tercipta lingkungan kerja yang memadai serta ketersediaan peralatan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.

- **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Target output subkegiatan Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan sebanyak 12 unit dan teralisasi 100%. Anggaran Sebesar Rp. 111.657.350,- , Realisasi Sebesar Rp. 107.165.000,- . Pengadaan terdiri dari: pengadaan Laptop 3 unit.

- Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya

Target output subkegiatan Jumlah Pembangunan taman, lapangan dan fasilitas Parkir yang diadakan sebanyak 1 unit dan teralisasi 100%. Anggaran Sebesar Rp. 64.200.000,- , Realisasi Sebesar Rp. 63.708.000,- . Pengadaan terdiri dari: pembangunan Lapangan Parkir kendaraan motor.

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target output subkegiatan Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 4 unit dan teralisasi 100%. Anggaran Sebesar Rp. 73.393.800,- , Realisasi Sebesar Rp. 73.300.000,- . Pengadaan terdiri dari: Gordyn kray, tangga alumunium, Kitchen set, AC 1 unit.

h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target output subkegiatan adalah Jumlah pelayanan surat menyurat yang disediakan sebanyak 1200 surat terealisasi 1.344 surat, sehingga capaian 112%. Anggaran Sebesar Rp. 19.234.880,- dan terealisasi Sebesar Rp. 19.189.000,- atau 99,76%.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyelenggaraan pembayaran biaya listrik dan air kantor dilaksanakan selama 12 bulan dengan jumlah rekening sebanyak 60, dari target Output kegiatan adalah sebanyak 55 Rekening sehingga realisasi capaian 91,67%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 87,33% dari target Anggaran Sebesar Rp. 58.009.868,- dan Realisasi Sebesar

Rp. 50.662.909,-. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan pemakaian.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target output subkegiatan adalah Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang dibayarkan sebanyak 4 orang terealisasi 4 orang, sehingga capaian 100%. Anggaran Sebesar Rp. 72.000.000,- dan terealisasi Sebesar Rp. 72.000.000,- atau 100%.

i. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Target output kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 9 unit dan terealisasi 9 unit atau sebesar 100 %. Anggaran sebesar 47.000.000,- terealisasi sebesar 46.429.609,-. Atau sebesar 98,79%, terdiri dari 2 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan perbaikan peralatan kerja agar dapat berfungsi dengan baik. Target Output kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki sebanyak 47 unit dan terealisasi 49 unit atau 104,26%. Ketersediaan jaringan listrik dengan input tegangan yang tidak stabil menyebabkan rentannya kerusakan peralatan kerja terutama peralatan elektronik. Anggaran sebesar Rp. 30.800.000,- terealisasi Sebesar Rp 30.705.000,- atau 99,69%.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target output subkegiatan Jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 unit dan teralisasi 100%. Anggaran Sebesar Rp. 25.595.800,- , terealisasi Sebesar Rp. 24.826.000,- . Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi bangunan gedung kantor.

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	Indikator Kinerja	IKK	Satuan	KONDISI AWAL 2021	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		TARGET AKHIR 2026
					2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)		Juta Rupiah	3.000.000	3.300.000	3.500.000	3.800.000	3.900.000	3.822.080	4.171.740	3.000.000	3.000.000	4.000.000
2.	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha		Nilai	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00	70.00	83,44	71.00	72.00	82.00
3.	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Persentase	90.01	92.01	94.01	96.01	98.01	97.40	97.76	98.78	98.80	100.00

Rata-rata Lama Penyelesaian Perizinan Usaha :

- 25,00 – 43,75 : Tidak Baik
- 43,76 – 62,50 : Kurang Baik
- * 62,51 – 81,25 : Baik
- * 81,26 – 100,00 : Sangat Baik

Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Target dari kinerja sasaran pendukung belum dapat digambarkan dengan jelas dalam tabel, hal ini karena penilaian SAKIP untuk tahun 2020 masih dalam proses evaluasi. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, terdapat beberapa komponen dalam evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang masih perlu penyempurnaan. Komponen tersebut adalah :

- a. Target kinerja yang diperjanjikan belum dipergunakan untuk mengukur keberhasilan
- b. IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- c. Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya
- d. Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- e. Belum ada mekanisme pengumpulan data kinerja
- f. Tidak ada pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan
- g. Belum dilakukan evaluasi program secara berkala
- h. Evaluasi program tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis perkantoran
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Kunjungan Kerja dalam daerah
- b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
 - Pembangunan taman, lapangan/Fasilitas parkir
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- e. Program perencanaan dan penganggaran SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Berdasarkan tabel.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai Investasi PMA

Penjelasan :

Realisasi nilai investasi PMA setiap tahunnya menjadi peningkatan positif, hal ini berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja.

2. Nilai Investasi PMDN

Penjelasan :

Peningkatan nilai PMDN di akibatkan oleh karena adanya kebijakan penyederhanaan perizinan dan perizinan sehingga kedepannya dalam rangka mendorong peningkatan PMDN harus diberikan kebijakan insentif investasi.

3. Jumlah Investasi PMA

Penjelasan :

Pada dasarnya pencapaian nilai realisasi PMA tidak terlepas dari kebijakan kemudahan berinvestasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini.

4. Jumlah Investasi PMDN

Penjelasan :

Realisasi jumlah investasi PMDN setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini di dorong oleh salah satu kebijakan penerapan perizinan secara online.

5. Presentase Jumlah Izin yang di terbitkan

Penjelasan :

Terjadi peningkatan persentase jumlah izin yang diterbitkan dari tahun 2017, 2018 ke tahun 2019 khususnya untuk izin tenaga kesehatan dan pengurusan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sudah tidak menerbitkan izin gangguan dan memberhentikan Retribusi Izin gangguan setelah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri No.500/3231/SJ Tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017.

6. Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti

Penjelasan :

- a. Berdasarkan hasil evaluasi layanan pengaduan dari masyarakat tentang tanggapan atau tindak lanjut keluhan pengguna pelayanan dapat di jelaskan bahwa dari tahun 2020 ke 2021 terdapat 7 (tujuh) pengaduan permasalahan yang bermasalah baik dari sektor bisnis maupun swasta, dari ke 7 permasalahan tersebut yang dapat kami selesaikan sebanyak 6 kasus sedang yang 1 (satu) kasus lainnya
-

diteruskan dan difasilitasi ke provinsi karena menjadi kebijakan provinsi.

- b. Sedikitnya pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk pada loket layanan DPMPTSP Kab. Luwu Timur, mencerminkan adanya peningkatan yang cukup baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat atau pengusaha dan ini sesuai dengan visi dan misi DPMPTSP Luwu Timur
- c. Dalam mendukung kegiatan pengelola pengaduan DPM PTSP Luwu Timur menyiapkan sarana dan prasarana layanan untuk menyampaikan pengaduan saran dari petugas pelayanan mendorong dan membantu bagi pengusaha untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
- d. Pengaduan atau penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dapat disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistim pelayanan informasi secara elektronik (internet, e-mail maupun telpon) dan melalui kotak saran layanan pengaduan yang sedia di DPM dan PTSP serta menyiapkan lembaran kuesioner indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai bentuk evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur.

7. Jumlah PMA dan PMDN yang dibina

Penjelasan :

Berdasarkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2021 ada 5 PMA yang selama ini di bina yang diselenggarakan tiap triwulan, sedangkan PMDN ada sekitar 16 PMDN yang selama ini diberikan Pembinaan.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat

Penjelasan :

Berdasarkan hasil kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama T.A 2021 dilaksanakan/dilakukan pengambilan sampel atau responden sebanyak 200 dengan hasil kegiatan tersebut dilaksanakan pada perusahaan yang tersebar di Kabupaten Luwu Timur 85,37 dimana metode dilakukan ada 2 yaitu secara langsung dilakukan di tempat perusahaan dan dilaksanakan pada saat melakukan pengurusan yang dilaksanakan di tempat.

9. Nilai Evaluasi AKIP

Penjelasan :

Berdasarkan penilaian dari Inspektorat, Hasil evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun 2017 diperoleh nilai skor 50 dengan peringkat C. Sedangkan hasil penilaian Tahun 2021 diperoleh nilai 62,34 dengan peringkat B, hasil ini mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2020.

10. Persentase Pegawai yang mendapat Diklat Per Tahun

Penjelasan :

Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan mulai dari tahun 2016 sampai ke tahun 2021 mengalami persentase rata-rata nilai 95 % setiap tahunnya, hal ini dikarenakan jumlah aparatur yang mengikuti Diklat tiap tahunnya sesuai dengan undangan Bimtek yang masuk dan jumlah anggaran yang tersedia.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Tingkat kinerja pelayanan perangkat Daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang penanaman modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan Bidang Penanaman Modal
- 2) Pengkoordinasian Kebijakan Bidang Penanaman Modal
- 3) Penyusunan Peta Potensi Penanaman Modal
- 4) Penyusunan Dokumen Penanaman Modal

Sesui dengan Tugas Pokok dan Fungsi di atas maka kinerja bidang penanaman modal difokuskan pada penyusunan kajian potensi penanaman modal, Peningkatan penyediaan data informasi PM dan promosi yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan citra Kabupaten Luwu Timur dimata investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu kinerja Bidang Penanaman Modal diukur dari peningkatan investasi setiap Tahunnya, baik dari segi presentase pertumbuhan jumlah proyek PMA dan PMDN dari tahu ke tahun, jumlah nilai investasi , maupun penyerapan tenaga kerja.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

- 1) Belum adanya regulasi untuk mempermudah investor untuk melakukan investasi sehingga mengurangi minat untuk melakukan investasi di Kabupaten Luwu Timur;
 - 2) Belum adanya dokumen/kajian potensi sector investasi yang dapat memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya;
 - 3) Belum tersedianya peta potensi investasi sebagai gambaran bagi investor;
 - 4) Belum tersedianya sarana prasana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Luwu Timur;
 - 5) Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur yang komprehensif dan aman. Dalam mengatasi masalah ini maka perlu peningkatakan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perizinan dan non perizinan.
-

Dalam skala lebih besar dimungkinkan perlunya 1 bank arsip perizinan dan non perizinan yang representative;

- 6) Belum tersedianya sumberdaya manusia yang memadai, sehingga perlu dilakukan Diklat pelayanan public; belum tersedianya anggaran yang memadai dalam proses pelayanan jemput bola kepada masyarakat.
- 7) Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan penyediaan tenaga OPD teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur sehingga waktu penyelesaian suatu perizinan dapat selesai dengan lebih cepat.

c. Dampak Terhadap pencapaian visi dan misi

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Luwu Timur terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpedoman kepada Peraturan perundangan dan SOP yang telah di tetapkan, di samping itu juga melakukan upaya - upaya sabagai berikut :

- Melakukan Pelayanan Sistem Jemput Bola/door to door untuk pengurusan IMB (Izin mendirikan bangunan) dan pengantaran izin usaha bagi perusahaan/kontraktor di kecamatan.
- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media Massa, Baliho, Brosur dan media online.
- Melakukan sosialisasi kepada Aparat Desa dan Kecamatan

d. Tantangan dan peluang

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Bidang Penanaman Modal Mempunyai tantangan sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur
-

2. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan berkualitas
3. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi
4. Belum adanya Perda Penanaman Modal dan Kemudahan Peluang Berusaha
5. Belum adanya Dokumen peluang investasi
6. Belum adanya Peta potensi investasi

Sedangkan Peluang yang ada antara lain :

1. Tingginya Dukungan Pemerintah memberikan peluang terhadap penanaman modal;
 2. Iklim usaha yang kondusif;
 3. Posisi geografis yang strategis
 4. Potensi yang berlimpah
- e. Formulasi isu-isu penting yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur guna mengatasi isu-isu penting tersebut adalah :

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal terdapat isi-isu penting guna meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Luwu Timur adalah peningkatan realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Langkah Strategis yang dilaksanakan Bidang Penanaman Modal guna mengatasi isu penting tersebut di atas adalah:

- a. Penyusunan regulasi untuk mempermudah investor melakukan investasi;
 - b. Penyederhanaan prosedur pelayanan;
 - c. Peningkatan kualitas kajian potensi Penanaman Modal;
 - d. Pemangkasan alur birokrasi pelayanan;
 - e. Peningkatan peran satuan Tugas Percepatan Berusaha;
 - f. Meningkatkan fasilitas pengembangan Penanaman Modal.
 - g. Peningkatan penyediaan data dan informasi penanaman modal.
-

Faktor-faktor penyebab tercapainya/terpenuhinya kinerja program/kegiatan, dalam pencapaian target SKPD, antara lain karena :

1. Mengutamakan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada Masyarakat dengan melakukan kegiatan pelayanan langsung jemput bola ke desa dan kecamatan seluruh wilayah kabupaten luwu timur.
2. Sebagai isu sentral “ Pelayanan Langsung yang merupakan Grend Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disambut baik oleh masyarakat.

Peningkatan Kompetensi SDM dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terutama dalam sistem program SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2023. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Bapelitbangda Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

LAMPIRAN 3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4	8	9	15	16
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			6.388.300.498,00		6.035.194.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.388.300.498,00		6.035.194.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.388.300.498,00		6.035.194.000,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar</i>	100 %	5.032.858.373,00	100 %	4.240.194.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu</i>	100 %	92.809.650,00	100 %	97.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	44.763.000,00	2 Dokumen	45.000.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.437.550,00	2 Dokumen	5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.907.650,00	2 Dokumen	6.500.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan	40.701.450,00	10 Laporan	41.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Presentase administrasi keuangan yang terselenggaran dengan baik</i>	100 %	3.105.466.603,00	100 %	2.925.000.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	19 Orang/bulan	2.987.737.003,00	24 Orang/bulan	2.800.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	117.729.600,00	18 Laporan	125.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %	17.925.520,00	100 %	17.500.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	17.925.520,00	4 Laporan	17.500.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100 %	152.041.000,00	100 %	131.700.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	44 Paket	60.900.000,00	46 Paket	33.000.000,00

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	12 Dokumen	17.309.000,00	12 Dokumen	00,00 17.500.0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	73.832.000,00	18 Orang	00,00 81.200.0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	345.535.400,00	100 %	487.494.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	5.721.000,00	12 Paket	6.400.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	3.380.000,00	3 Paket	10.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	7.951.000,00	2 Paket	15.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	10.660.000,00	3 Paket	14.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	5 Dokumen	8.040.000,00	60 Dokumen	7.700.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	10 Laporan	10.800.000,00	150 Laporan	11.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	250 Laporan	298.983.400,00	300 Laporan	423.394.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentasi BMD-PD penunjang yang terpenuhi</i>	100 %	1.049.010.000,00	100 %	72.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	0 Unit	0,00
Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Unit	20.250.000,00	5 Unit	10.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	6.760.000,00	4 Unit	10.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1.010.000.000,00	0 Unit	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	12.000.000,00		52.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	146.240.200,00	100 %	402.000.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4 Laporan	21.680.200,00	900 Laporan	21.500.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan	47.760.000,00	60 Laporan	58.500.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	76.800.000,00	4 Laporan	322.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</i>	60 unit	123.830.000,00	100 %	107.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	10 Unit	41.750.000,00	12 Unit	54.000.000,00

	Jabatan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	47 Unit	22.150.000,00	47 Unit	23.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	59.930.000,00	1 Unit	30.000.000,00
2,	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala Nasional</i>	50 Investor	206.998.450,00	50 Investor	470.000.000,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi</i>	100 %	91.999.050,00	100 %	170.000.000,00
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	0,00	0 Dokumen	100.000.000,00
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	15 Dokumen	91.999.050,00	2 Dokumen	70.000.000,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jenis potensi yang disusun dalam Peta</i>	100 %	114.999.400,00	100 %	300.000.000,00
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	114.999.400,00	1 Dokumen	300.000.000,00
3,	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah realisasi PMA dan PMDN</i>	4 Triliun	294.909.350,00	4 Triliun	435.000.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan</i>	6 MoU	294.909.350,00	7 MoU	435.000.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	269.369.950,00	4 Dokumen	400.000.000,00

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	3 Dokumen	25.539.400,00	3 Dokumen	35.000.000,00
4,	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP</i>	78 %	374.002.925,00	78 %	387.000.000,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan</i>	100 %	374.002.925,00	100 %	387.000.000,00
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	4400 Pelaku Usaha	350.000.200,00	4500 Pelaku Usaha	360.000.000,00
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	10 Pelaku Usaha	24.002.725,00	9 Pelaku Usaha	27.000.000,00
5,	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan</i>	80 %	452.531.400,00	80 %	465.000.000,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaku Usaha yang taat menyampaikan LKPM</i>	90 %	452.531.400,00	90 %	465.000.000,00
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	8 Kegiatan Usaha.	61.719.000,00	65 Kegiatan Usaha.	70.000.000,00

	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	250 Pelaku Usaha	226.304.550,00	45 Pelaku Usaha	230.000.000,00
	Pengawasan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	15 Kegiatan Usaha	164.507.850,00	60 Kegiatan Usaha	165.000.000,00
6,	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Database yang valid</i>	1 Dokumen	27.000.000,00	1 Dokumen	38.000.000,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola</i>	100 %	27.000.000,00	100 %	38.000.000,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	1 Dokumen	27.000.000,00	2 Dokumen	38.000.000,00
	TOTAL			6.388.300.498,00		6.035.194.000,00
	Jumlah Program			6 Program		
	Jumlah Kegiatan			14 Kegiatan		
	Jumlah Subkegiatan			39 Subkegiatan		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sinkronisasi program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang telah ditetapkan melalui **RPJMD** dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh tim perancangan daerah (BAPPELITBANGDA) yang di kemudian hari oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di perjelas dalam bentuk Program Prioritas dengan indikator keluaran / sasaran dan pagu indikatif yang jelas.
- Program prioritas dan pagu indikatif dari masing-masing bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) akan menjadi bahan diskusi dalam Musrembang Kecamatan Untuk menyusun rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan di bahas dalam Musrembang Kabupaten.
- Hasil Musrembang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPД tahun tersebut.

Secara Spesifik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada Rencana Kerja tahun 2023 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, namunpun demikian kalau ada usulan dari masyarakat yang terkait permasalahan Perizinan dan Non Perizinan yang terjadi di masyarakat, maka kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap menerima dan akan menindaklanjuti dari usulan tersebut demi kepentingan masyarakat khususnya para pelaku usaha.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku Kepentingan.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah). Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha
2. izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
3. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
4. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
5. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SiCantik. SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri adalah aplikasi berbasis web yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan 2026. Penetapan tujuan ini harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat melahirkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai.

Penjabaran dari tujuan secara spesifik dan terukur dirumuskan kedalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur.

LAMPIRAN. 4
TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2025

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	Rasio Daya Serap Tenaga kerja(PMDN dan PMA)	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	4.000.000.000.000
2	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Pelayanan perizinan usaha	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase lama penyelesaian perizinan usaha	78.00
3	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP	Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94.01

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2025 terdiri dari 6 program yang meliputi 14 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan kinerja penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar yang terdiri dari kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan jumlah Investor PMA dan PMDN terdiri dari kegiatan :

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota
-

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program tersebut diarahkan untuk Meningkatkan Rencana Investasi Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program tersebut diarahkan untuk menghitung Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdiri dari kegiatan :

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program tersebut diarahkan untuk menghitung Cakupan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari kegiatan :

- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan 1 dokumen database Penanaman Modal yang valid, terdiri dari kegiatan :

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
-

**T-C.33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DPMP TSP TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target Capaian		LOKASI	SUMBER DANA	Target	Pagu (Rp)
			Target	Pagu (Rp)				
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %	4.014.733.758,00				4.343.961.481,00
2.18.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, panganggaran & evaluasi tepat waktu</i>	100 %	82.865.350,00				100.816.402,00
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	39.050.500,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		42.000.000,00
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							

		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.379.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.964.479,00
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.907.650,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.772.648,00
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan	36.528.200,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		40.079.275,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan</i>	100 %	3.122.266.203,00				2.966.718.662,00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							

		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	21 Orang/bulan	3.016.539.263,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2.853.941.001,00
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	105.726.940,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		112.777.661,00
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan</i>	100 %	17.416.150,00				17.574.063,00
2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	17.416.150,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.574.063,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan</i>	100 %	139.804.000,00				156.336.990,00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							

		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	43 Paket	0,00	Kab. Luwu Timur, Malili, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		32.781.810,00
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	4 Dokumen	22.874.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.300.000,00
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	4 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000,00
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	13 Orang	116.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81.255.180,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang penuh</i>	100 %	420.225.085,00				489.898.713,00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							

		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	4.885.700,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.400.430,00
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	25.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10.927.270,00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	7.648.385,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.733.411,00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							
		<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	10.660.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.943.042,00
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	60 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.500.000,00

2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	150 Laporan	10.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11.000.000,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	270 Laporan	353.231.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		423.394.560,00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah yang diadakan</i>	100 %	16.000.000,00				337.381.212,00
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.500.000,00
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 Unit	9.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.000.000,00

2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	7.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		52.881.212,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan</i>	100 %	132.906.970,00				164.054.510,00
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	900 Laporan	21.498.970,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.000.000,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	60 Laporan	34.608.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		63.378.166,00

2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan	76.800.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		78.676.344,00
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	100 %	83.250.000,00				111.180.929,00
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	9 Unit	45.650.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		49.445.897,00
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	47 Unit	22.600.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		33.765.810,00
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		27.969.222,00

2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	45 Angka	277.398.700,00				265.157.859,00
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi</i>	100 %	62.399.000,00				65.157.859,00
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
		<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	2 Dokumen	62.399.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65.157.859,00
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase jenis potensi yang disusun dalam Peta Potensi kabupaten (%)</i>	100 %	214.999.700,00				200.000.000,00
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
		<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	214.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000,00
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah realisasi PMA Jumlah Realisasi PMDN	290000000 0000 900000000 000 Rupiah Rupiah	762.147.590,00				426.163.530,00

2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah MoU Penanaman Modal yang dihasilkan</i>	7 MoU	762.147.590,00				426.163.530,00
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	4 Dokumen	559.509.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		382.454.450,00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota							
		<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	3 Dokumen	202.638.490,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		43.709.080,00
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan waktu penyelesaian Izin yang diterbitkan sesuai SOP	77 %	316.309.450,00				387.122.410,00
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu</i>	100 %	316.309.450,00				387.122.410,00
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							

		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	0 Pelaku Usaha	295.727.100,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		360.599.910,00
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko							
		<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	6 Pelaku Usaha	20.582.350,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		26.522.500,00
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap peraturan yang terkait dengan Penanaman Modal	85 %	452.532.000,00				471.000.000,00
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pelaku usaha yang Menyampaikan LKPM</i>	90 %	452.532.000,00				471.000.000,00
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							

		<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya</i>	9 Kegiatan Usaha.	61.719.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL		150.000.000,00
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							
		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	244 Pelaku Usaha	226.305.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL		217.000.000,00
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal							
		<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>	15 Kegiatan Usaha	164.508.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL		104.000.000,00
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	1 Angka	24.000.000,00				37.815.385,00

2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola</i>	100 %	24.000.000,00				37.815.385,00
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
		<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	2 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		37.815.385,00
J U M L A H				5.847.121.498,00				5.931.220.665,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai pemimpin Dinas dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk tetap bersinergis dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi-instansi terkait dalam peningkatan pembangunan sesuai dengan **visi misi “Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Untuk itu kelompok sasaran yang diprioritaskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah. Selain itu, aparatur pemerintah atau SDM yang ada di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Pendanaan indikatif merupakan estimasi pagu anggaran yang disiapkan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan. Estimasi tersebut berdasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 dan memperhatikan perkembangan kegiatan yang mengharuskan ketersediaan dana yang cukup untuk menunjang suatu kegiatan agar tujuan menjadi berhasil guna dan memiliki azas manfaat lebih.

Pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD dan diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat lihat pada Tabel 7:

TABEL 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Indikatif
DPMPTSP Kab. Luwu Timur Tahun 2025

NO	RANCANGAN AWAL RKPd				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	3	4	8	9	15	16
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			6.388.300.498,00		6.035.194.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.388.300.498,00		6.035.194.000,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.388.300.498,00		6.035.194.000,00
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan sesuai standar</i>	100 %	5.032.858.373,00	100 %	4.240.194.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu</i>	100 %	92.809.650,00	100 %	97.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	44.763.000,00	2 Dokumen	45.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.437.550,00	2 Dokumen	5.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen	3.907.650,00	2 Dokumen	6.500.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	10 Laporan	40.701.450,00	10 Laporan	41.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Presentase administrasi keuangan yang terselenggarakan dengan baik</i>	100 %	3.105.466.603,00	100 %	2.925.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	19 Orang/bulan	2.987.737.003,00	24 Orang/bulan	2.800.000.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18 Laporan	117.729.600,00	18 Laporan	125.000.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	100 %	17.925.520,00	100 %	17.500.000,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4 Laporan	17.925.520,00	4 Laporan	17.500.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100 %	152.041.000,00	100 %	131.700.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	44 Paket	60.900.000,00	46 Paket	33.000.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	12 Dokumen	17.309.000,00	12 Dokumen	17.500.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	15 Orang	73.832.000,00	18 Orang	81.200.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah</i>	100 %	345.535.400,00	100 %	487.494.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket	5.721.000,00	12 Paket	6.400.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	3.380.000,00	3 Paket	10.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor</i>	2 Paket	7.951.000,00	2 Paket	15.000.000,00

		<i>yang Disediakan</i>				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	10.660.000,00	3 Paket	14.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	5 Dokumen	8.040.000,00	60 Dokumen	7.700.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	10 Laporan	10.800.000,00	150 Laporan	11.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	250 Laporan	298.983.400,00	300 Laporan	423.394.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Presentasi BMD-PD penunjang yang terpenuhi</i>	100 %	1.049.010.000,00	100 %	72.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit	0,00	0 Unit	0,00	
Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Unit	20.250.000,00	5 Unit	10.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	6.760.000,00	4 Unit	10.000.000,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1.010.000.000,00	0 Unit	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit	12.000.000,00		52.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Presentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	146.240.200,00	100 %	402.000.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	4 Laporan	21.680.200,00	900 Laporan	21.500.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan	47.760.000,00	60 Laporan	58.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	76.800.000,00	4 Laporan	322.000.000,00	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik</i>	60 unit	123.830.000,00	100 %	107.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	10 Unit	41.750.000,00	12 Unit	54.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	47 Unit	22.150.000,00	47 Unit	23.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	59.930.000,00	1 Unit	30.000.000,00
2,	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala Nasional</i>	50 Investor	206.998.450,00	50 Investor	470.000.000,00
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi</i>	100 %	91.999.050,00	100 %	170.000.000,00
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	1 Dokumen	0,00	0 Dokumen	100.000.000,00
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>	15 Dokumen	91.999.050,00	2 Dokumen	70.000.000,00
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Persentase Jenis potensi yang disusun dalam Peta</i>	100 %	114.999.400,00	100 %	300.000.000,00
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	114.999.400,00	1 Dokumen	300.000.000,00
3,	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah realisasi PMA dan PMDN</i>	4 Triliun	294.909.350,00	4 Triliun	435.000.000,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah MOU Penanaman modal yang dihasilkan</i>	6 MoU	294.909.350,00	7 MoU	435.000.000,00
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	269.369.950,00	4 Dokumen	400.000.000,00
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	3 Dokumen	25.539.400,00	3 Dokumen	35.000.000,00

4,	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan waktu penyelesaian izin sesuai SOP	78 %	374.002.925,00	78 %	387.000.000,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase capaian Kinerja Pelayanan perizinan dan Nonperizinan</i>	100 %	374.002.925,00	100 %	387.000.000,00
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	4400 Pelaku Usaha	350.000.200,00	4500 Pelaku Usaha	360.000.000,00
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	10 Pelaku Usaha	24.002.725,00	9 Pelaku Usaha	27.000.000,00
5,	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang taat terhadap peraturan	80 %	452.531.400,00	80 %	465.000.000,00
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaku Usaha yang taat menyampaikan LKPM</i>	90 %	452.531.400,00	90 %	465.000.000,00
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	8 Kegiatan Usaha.	61.719.000,00	65 Kegiatan Usaha.	70.000.000,00
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	250 Pelaku Usaha	226.304.550,00	45 Pelaku Usaha	230.000.000,00
	Pengawasan Penanaman Modal	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan</i>	15 Kegiatan Usaha	164.507.850,00	60 Kegiatan Usaha	165.000.000,00

		<i>Berusaha</i>				
6,	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Jumlah Database yang valid</i>	1 Dokumen	27.000.000,00	1 Dokumen	38.000.000,00
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase data dan informasi penanaman modal yang dikelola</i>	100 %	27.000.000,00	100 %	38.000.000,00
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	1 Dokumen	27.000.000,00	2 Dokumen	38.000.000,00
	TOTAL			6.388.300.498,00		6.035.194.000,00
	Jumlah Program			6 Program		
	Jumlah Kegiatan			14 Kegiatan		
	Jumlah Subkegiatan			39 Subkegiatan		

BAB V. PENUTUP

Dokumen rencana kerja (Renja) ini disusun dengan tetap memperhatikan arahan dan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.

Renja ini memiliki fungsi sebagai instrument pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini diharapkan dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2025 diharapkan akan mengacu pada Renja yang telah disepakati bersama.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, Juni 2024
Kepala Dinas



Andi Habil Unru,SE

Nip: 19641231 198703 1 208